

**ANALISIS PENGARUH INDIKATOR EKONOMI  
MAKRO DAN KREDIT USAHA KECIL  
TERHADAP KREDIT PEGADAIAN  
STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR  
WILAYAH SEMARANG**



**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna  
memperoleh derajat sarjana S-2 Magister Manajemen  
Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro**

**Oleh :**

**S U T A R N O, S.E  
NIM. C 4A098257**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**



### *Sertifikasi*

Saya, *Sutarno*, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program magister manajemen ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Sutarno

24 Oktober 2002

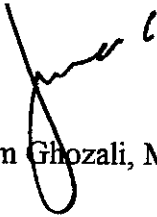
## PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :

**ANALISIS PENGARUH INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN  
KREDIT USAHA KECIL TERHADAP KREDIT PEGADAIAN  
STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN  
KANTOR WILAYAH SEMARANG**

yang disusun oleh Sutarno, NIM C4A098257  
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Oktober 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama



Dr. Imam Ghozali, M.Com; Akt

Pembimbing Anggota



Dra. Irene Rini DP, ME

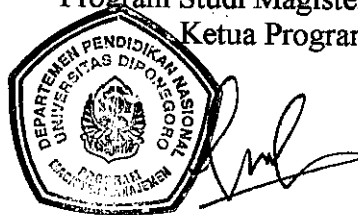
Semarang, 24 Oktober 2002

Universitas Diponegoro

Program Pascasarjana

Program Studi Magister Manajemen

Ketua Program



Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo

## ABSTRACT

*Pawnshops in Indonesia are source of credit alternative to millions of Indonesians. They turn to Pawnshop for credit because may they are excluded from mainstream financial market or bank institution. Others use Pawnshop for their discretion and convenience because of cash loans are disbursed in a matter of minutes. Interestingly, Indonesian Pawnshop has grown in importance from year to year. In 1998 one year and half after economic crisis in Indonesia, where most of economic performance indicator slumped and many of bank institution was collapse, on the contrary Pawnshop loan made the highest growth over the last five years. Although Pawnshop make a continuous growth, but there is social believe attached, that the growth of pawnshop reflecting an increase in the percentage of poverty level. And the actual fact that, a few of academic studies have been made about pawnbroking industry especially in the publications journal.*

*This study designed to examine the impact of macro economic indicator and small scale business credit to the Pawnshop Loan, especially in Semarang Pawnshop Regional Office. Drawing data on twelve region in Central Java where Semarang Pawnshop Regional Office operate, from 1996 to 2000, this study used Pawnshop Loan as a dependent variable and as explanatory variable be employed Gross Domestic Regional Product, per Capita (Regional) Income, Unemployment (to represent economic indicators) and Small Scale Business Credit.*

*Use linear regression model analysis with 5% significance level, the analysis show that 60 % variations of Pawnshop Loan can be explained significantly by the variation of variables included in the model and 40 % left be explained by variable excluded in the model. In the individually hypothesis test show that Gross Domestic Regional Product and per Capita Income negatively and positively in a row affect the Pawnshop Loan but not significance , whereas both of Unemployment and Small Scale Business Credit positively and significantly affect the Pawnshop Loan.*

## **ABSTRAK**

Pegadaian di Indonesia merupakan sumber kredit alternatif bagi jutaan orang Indonesia. Orang datang ke Pegadaian tampaknya oleh karena keadaan ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk memperoleh kredit dari lembaga kredit yang lumrah atau perbankan. Sebagian lagi mereka menggunakan jasa Pegadaian oleh karena kecepatannya untuk memperoleh uang kas. Yang menarik perhatian adalah fenomena kredit yang disalurkan oleh Pegadaian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Pada tahun 1998 satu setengah tahun setelah terjadinya krisis ekonomi dimana sebagian besar kinerja / indikator ekonomi merosot dan banyak perbankan yang ambruk, justru kredit Pegadaian menunjukkan pertumbuhan tertinggi selama lebih dari lima tahun terakhir. Walaupun terus bertumbuh namun Pegadaian masih ada kepercayaan yang melekat di masyarakat, yaitu bahwa Pegadaian merupakan ukuran kemiskinan. Dan suatu kenyataan bahwa masih sedikit penelitian dilakukan oleh kalangan akademisi mengenai industry pegadaian khususnya pada jurnal yang dipublikasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator ekonomi makro dan Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit Pegadaian di Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Semarang. Sebagai Kredit Pegadaian diambil pinjaman yang disalurkan oleh Cabang Pegadaian di 12 kabupaten/kotamadya dimana Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Semarang beroperasi dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000.. Sedangkan sebagai indikator ekonomi makro digunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto, Pendapatan per Capita, dan Jumlah Pengangguran.

Menggunakan analisis regresi linier dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh hasil bahwa 60 % Kredit Pegadaian secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto, Pendapatan per Capita, Jumlah Pengangguran dan Kredit Usaha Kecil sedangkan sisanya 40 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Dari uji variabel bebas secara individual menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan untuk Tingkat Pengangguran dan Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit Pegadaian, sedangkan untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Pendapatan per Capita masing-masing mempunyai pengaruh negatif dan positif terhadap Kredit Pegadaian, namun keduanya tidak signifikan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang atas berkah dan karuniaNya kepada Penulis, sehingga tesis yang berjudul “ANALISIS PENGARUH INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN KREDIT USAHA KECIL TERHADAP KREDIT PEGADAIAN STUDI KASUS PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR WILAYAH SEMARANG” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah berkenan memberikan bimbingan, bantuan, dan perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain :

1. Bapak Drs. Anda Suhandi, M.M selaku Pimpinan Wilayah PERUM Pegadaian Semarang yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam mengakses data dan Sdr. Hendra Susanto, S.E staf di Bagian Operasional, yang telah membantu perolehan data yang sangat berguna dalam penelitian ini.
2. Bapak Dr. Imam Ghozali, M.Com, Akt dan Ibu Dra. Irene Rini DP, M.E masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah memberikan perhatian dan bimbingannya sejak awal penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo selaku Direktur Program Studi Magister Manajemen UNDIP beserta seluruh Staf Pengajar dan Karyawan / Karyawatnya yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan pelayanannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Titi Rosanti, S.E selaku yang menjabat Kepala Seksi Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Semarang, yang telah membantu dalam perolehan data yang sangat berguna.
5. Pengelola Perpustakaan Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah dan Pengelola Perpustakaan MM UNDIP yang telah memberikan bantuan dan fasilitas.
6. Rekan-rekan Penulis pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang yang telah mendorong dan memberikan semangat.
7. Kedua orang tua dan keluarga Penulis yang dengan kasih sayang dan doanya yang tulus telah memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Program Master.
8. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan disini satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran bagi peningkatan kualitas penelitian ini sangat diharapkan. Akhirnya Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya dan PERUM Pegadaian pada khususnya.

Semarang, 24 Oktober 2002



SUTARNO, S.E

## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul Penelitian .....	i
Sertifikasi .....	ii
Pengesahan Tesis .....	iii
Abstract .....	iv
Abstrak... ..	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Outline Tesis .....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka .....	10



2.1.1 Karakteristik Pegadaian .....	10
2.1.2 Kredit Pegadaian .....	12
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	14
2.1.4 Pendapatan per Capita .....	17
2.1.5 Tingkat Pengangguran .....	18
2.1.6 Kredit Usaha Kecil .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
2.3 Kerangka Pikir .....	25
2.4 Model dan Hipotesis .....	26
2.4.1 Model Penelitian .....	26
2.4.2 Hipotesis .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.2 Populasi .....	28
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	29
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	29
3.5 Tehnik Analisis .....	30
3.5.1 Uji Asumsi Klasik .....	30
3.5.2 Uji Hipotesis .....	33
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	36
4.1.1 Sejarah Singkat PERUM Pegadaian .....	36

4.1.2 Pengertian dan Fungsi PERUM Pegadaian .....	38
4.1.3 Kegiatan Usaha Pegadaian .....	39
4.1.4 Operasional Jasa Gadai .....	41
4.1.5 PERUM Pegadaian Kantor Wilayah Semarang .....	43
4.2 Proses dan Hasil Komputasi Data .....	45
4.2.1 Koefisien Regresi .....	45
4.2.2 Koefisien Determinasi .....	46
4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....	47
4.3 Pengujian Hipotesis .....	52
4.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual .....	52
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan .....	58
<b>BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN</b>	
5.1 Simpulan .....	61
5.2 Implikasi Kebijakan .....	64
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	65
5.4 Agenda Penelitian Mendatang .....	65
Daftar Referensi .....	66
Lampiran-lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Kredit Pegadaian, PDRB, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran, dan KUK per Kabupaten/ Kotamadya Tahun 1996 – 2000 .....	3
Tabel 2.1 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Pegadaian .....	24
Tabel 4.1 : Golongan Kredit, Sewa Modal (Tingkat Bunga), Jangka Waktu Kredit dan Bea Asuransi .....	42
Tabel 4.2 : Kredit per Golongan dan Profesi Nasabah .....	43
Tabel 4.3 : Pertumbuhan Kredit Pegadaian Kantor Wilayah Semarang Tahun 1997 - 2001.....	44
Tabel 4.4 : Coefficients .....	45
Tabel 4.5 : Model Summary .....	47
Tabel 4.6 : Anova .....	59

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Pengaruh PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran, dan Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit Pegadaian .....	26
Gambar 4.1 : Scatterplot .....	50
Gambar 4.2 : Grafik Normal Probability Plot .....	51
Gambar 4.3 : Histogram .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Data Pinjaman yang Diberikan Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Semarang Tahun 1996 – 2000 .....	69
Lampiran II : Data Pinjaman yang Diberikan (Kredit Pegadaian) Per Kabupaten / Kota Madya di Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Semarang , Tahun 1996 – 2000 .....	70
Lampiran III : Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 12 Kabupaten di Jawa Tengah .....	71
Lampiran IV : Data Pendapatan per Capita 12 Kabupaten di Jawa Tengah .....	71
Lampiran V : Data Jumlah Pengangguran di 12 Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 .....	72
Lampiran VI : Data Kredit Usaha Kecil di 12 Kabupaten/Kodya di Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 .....	72
Lampiran VII : Kredit Pegadaian, PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran, dan KUK di 12 Kabupa- ten / Kota Madya di Jawa Tengah, Tahun 1996 – 2000 .....	73
Lampiran VIII : Print out Regresi (dengan program SPSS ) .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Pegadaian adalah perusahaan yang menyalurkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak. Perusahaan Pegadaian di Indonesia yang telah berada sejak tahun 1901, pada saat ini berstatus Perusahaan Umum atau PERUM dan outletnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari kota besar hingga kecamatan. Data akhir tahun 2001 menunjukkan jumlah Kantor Cabang Pegadaian di seluruh Indonesia sebanyak 716 Cabang, di Jawa Tengah dan DIY sebanyak 169 Cabang dan di Kodya Semarang sendiri terdapat 9 (sembilan) Cabang. PERUM Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kelompok Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yang mengemban misi (1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui pemberian kredit atas dasar hukum gadai dan jasa keuangan lainnya (2) menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Data mengenai perkembangan penggadaian di luar negeri (Caskey, 1991) menunjukkan, di Amerika Serikat hampir di semua negara bagian penggadaian (pawnbroking) menunjukkan perkembangan yang pesat. sementara di Inggris justru *collaps*. Texas adalah negara bagian dimana terjadi perkembangan penggadaian terpesat; pada tahun 1980 ada 787 pawnbroking menjadi 1.270 pawnbroking pada tahun 1988. Di negara bagian lainnya pada periode yang sama menunjukkan sbb. : di

Pennsylvania dari 27 menjadi 37, di Indiana dari 26 menjadi 32, di Maine dari 8 menjadi 13, di Oregon dari 11 menjadi 13 namun di New Jersey mengalami penurunan yaitu dari 27 menjadi 16.

Perkembangan pegadaian di Amerika Serikat dijelaskan sebagai akibat dari kesulitan ekonomi, meningkatnya jumlah orang Amerika yang tidak menggunakan mainstream institusi keuangan oleh karena miskin dan efek dari deregulasi bank dan peningkatan yang substansial jumlah orang Amerika yang berpendapatan rendah. Antara tahun 1878 – 1988 sebagai contoh, tingkat kemiskinan secara nasional meningkat dari 11,4% menjadi 13,1% atau meningkat 7,5 juta orang di bawah garis kemiskinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Steiner dan Strischek (1992), bahwa di AS walaupun keadaan ekonomi yang *decline* telah mempunyai efek yang menghancurkan banyak bisnis, namun penggadaian justru berkembang dengan baik.

Sedangkan riset penggadaian di Inggris (Caskey, 1991) menunjukkan, penurunan yang tajam penggadaian dari 3.000 pada tahun 1900 menjadi 175 penggadaian yang masih beroperasi pada tahun 1991. *Collapsnya* penggadaian di Inggris disebutkan ada hubungannya dengan tumbuhnya sumber kredit konsumsi baru, meningkatnya pendapatan per capita, meningkatnya ukuran kemakmuran masyarakat, dan tumbuhnya social stigma untuk menggunakan atau masuk dalam profesi penggadaian. Hal ini sejalan dengan kebalikan arti dari yang dinyatakan oleh Syedain (1991), bahwa masa kesulitan ekonomi berarti bisnis yang bagus bagi pawnbrokers di Inggris.

Dari uraian di atas diketahui bahwa kondisi ekonomi yang menurun (dengan indicator-indikatornya : pendapatan domestik bruto, pendapatan per kapita, dan tingkat pengangguran), dapat menyebabkan penggadaian atau kredit penggadaian berkembang namun di negara bagian Pennsylvania tidak. Dan *collapsnya* penggadaian ada hubungannya dengan meningkatnya kondisi ekonomi, meningkatnya ukuran kemakmuran masyarakat dan meningkatnya kredit konsumsi (kredit berskala kecil).

Yang menarik perhatian adalah fenomena Kredit Pegadaian di Kantor Wilayah Semarang, dimana pertumbuhan kreditnya tidak konsisten dengan kenaikan atau penurunan indicator-indikator ekonomi seperti PDRB, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran dan juga Kredit Usaha Kecil, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1  
Perkembangan Kredit Pegadaian, PDRB, Pendapatan per Capita,  
Tingkat Pengangguran dan KUK per Kabupaten/Kotamadya  
di Daerah Operasional Kanwil PERUM Pegadaian Semarang  
Tahun 1996 s.d 2000

Keterangan	Th.1996	Th.1997	Th.1998	Th.1999	Th.2000
Kredit Pegadaian	94.426	101.983	167.317	178.876	239.465
Growth KP (%)		108	164	107	134
PDRB	17.003.206	17.860.692	15.831.691	16.198.923	16.802.161
Growth PDRB (%)		105	89	102	104
Pend.per Capita	22.394.701	23.056.059	20.552.838	20.821.783	21.102.663
Growth PPC (%)		103	89	101	101
Tk. Pengangguran	207.902	238.057	305.916	336.137	244.659
Growth TP (%)		115	129	110	73
Kredit Usaha Kecil	2.045.674	2.534.823	2.152.297	1.994.564	2.237.025
Growth KUK (%)		124	85	93	112

Sumber : Data sekunder  
yang diolah.



Dari Tabel 1.1 tampak bahwa pada tahun 1998 satu setengah tahun setelah terjadi krisis ekonomi, kredit Pegadaian menunjukkan pertumbuhan tertinggi dimana pada saat itu PDRB, Pendapatan per Kapita dan KUK pertumbuhannya menurun dan Tingkat Pengangguran meningkat. Menurut Kwik Kian Gie (1999, p.9), krisis ekonomi berarti titik balik dari pertumbuhan ekonomi menjadi kemerosotan ekonomi yang ditandai oleh : inflasi berat, anjloknya nilai rupiah, tingkat bunga sangat tinggi, tingkat pengangguran meningkat, produksi dan ekspor menurun, produk domestik bruto menurun (pertumbuhan negatif), dan income per capita menurun.

Namun pada tahun 1999 pertumbuhan kredit Pegadaian menurun tajam (57%) dan meningkat lagi pada tahun 2000 pada saat PDRB dan KUK meningkat, Pendapatan per Kapita tetap dan Tingkat Pengangguran menurun.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam pengukuran maju mundurnya perekonomian suatu daerah. PDRB menurut pendekatan pendapatan, adalah jumlah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh para pemilik faktor produksi dalam perekonomian suatu daerah. PDB menurut Sapphry (1997) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Kredit Pegadaian.

Pendapatan per Kapita adalah jumlah pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pendapatan per Kapita merupakan alat pengukur kesejahteraan suatu masyarakat yang sesungguhnya karena telah mempertimbangkan jumlah penduduk yang menikmati pendapatan domestik regional bruto. Penelitian Caskey (1991) menunjukkan pendapatan per capita berpengaruh

secara signifikan terhadap kredit penggadaian (pawnshop loan) di negara bagian Indiana, namun di negara bagian Oregon tidak signifikan.

Tingkat Pengangguran adalah prosentase penduduk yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja. Penelitian Caskey (1991), tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan di negara bagian Indiana, sedangkan di negara bagian Oregon tidak.

Sedangkan KUK (kredit usaha kecil) adalah skim kredit khusus yang disalurkan kepada usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah sebagaimana ditentukan oleh UU. No.9/1995. Ekspansi atau permintaan KUK disebabkan oleh karena tingkat bunganya yang lebih rendah dari kredit komersial lainnya. Menurut Caskey (1991) dan Bobby (1999) tingkat bunga berpengaruh secara signifikan terhadap kredit Pegadaian.

Perlu dikemukakan pula disini, bahwa masih ada persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa Pegadaian adalah parameter atau representasi dari kemiskinan. Sebagaimana dikatakan oleh Ketut (2002 : 2) bahwa bagi orang yang terdesak kebutuhan keuangan Pegadaian dianggap sebagai dewa penolong, sebaliknya orang-orang yang berkecukupan memandang Pegadaian dengan sebelah mata, menganggap warisan feodal, menjatuhkan martabat atau gengsi, riba dan identik dengan kemiskinan.

Dan hingga saat ini penelitian mengenai Pegadaian di Indonesia masih sangat sedikit dilakukan. Hal ini mungkin dikarenakan lembaga formal yang ada dalam bisnis atau industri pegadaian hanya PERUM Pegadaian. Hal ini tentunya akan lain

di masa yang akan datang, dimana orang akan tertarik untuk meneliti industri pegadaian apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memungkinkan swasta maupun badan usaha milik pemerintah lainnya masuk dalam bisnis pegadaian.

Oleh karena tidak adanya konsistensi hasil penelitian mengenai factor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi kredit pegadaian sebagaimana disebutkan di atas, adanya persepsi masyarakat bahwa Pegadaian adalah parameter kemiskinan dan masih sedikitnya penelitian mengenai kredit Pegadaian, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah indikator-indikator ekonomi makro (khususnya PDRB, pendapatan per kapita, dan tingkat pengangguran) dan kredit usaha kecil berpengaruh secara signifikan terhadap kredit Pegadaian.

## **1. 2. Perumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah pertanyaan penelitian :

1. Bagaimanakah pengaruh kondisi ekonomi (yang masing-masing akan diukur dengan indikator-indikator produk domestik regional bruto, pendapatan *per capita* dan tingkat pengangguran) secara parsial terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian ?
2. Bagaimanakah pengaruh kredit usaha kecil terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian ?

3. Bagaimanakah pengaruh produk domestik regional bruto, pendapatan *per capita*, tingkat pengangguran dan kredit usaha kecil secara bersama-sama / secara simultan terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian ?

### **1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1). Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian
- 2). Menganalisis pengaruh pendapatan *per capita* terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian
- 3). Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian
- 4). Menganalisis pengaruh kredit usaha kecil terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian.
- 5). Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, pendapatan *per capita*, tingkat pengangguran dan kredit usaha kecil secara bersama-sama terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

- 1). Bagi masyarakat khususnya para investor obligasi dan *promissory note* PERUM Pegadaian, dengan mengetahui pengaruh kondisi ekonomi

- (termasuk pengaruh di sektor keuangan/perbankan) terhadap bisnis pegadaian maka akan mempunyai informasi yang cukup dalam mengambil keputusan investasinya.
- 2) Bagi manajemen PERUM Pegadaian dengan mengetahui pengaruh kondisi ekonomi dan keuangan/perbankan terhadap bisnis pegadaian maka akan mempunyai informasi yang cukup dalam mengambil keputusan perencanaan / operasionalnya.
  - 3). Bagi para akademisi di bidang ekonomi moneter (*monetary economist*) untuk pembuatan teori dan studi empiris terhadap industri pegadaian di masa yang akan datang (setelah tidak adanya *entry barrier*).

#### **1.4. Outline Tesis**

Tesis ini diorganisir sebagai berikut : Bab I berisi Latar belakang atau alasan diadakannya penelitian, termasuk apa yang menjadi masalah sehingga menarik untuk diadakan penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian, dan diakhiri dengan uraian secara garis besar tentang tesis ini.

Bab II membahas mengenai teori-teori yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian termasuk jawaban sementara (hipotesis). Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti juga diungkapkan dan diakhiri dengan definisi-definisi variabel yang digunakan.

Bab III mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, dan diakhiri dengan teknis analisis yang digunakan. Bab IV pada intinya memaparkan hasil pemrosesan data dengan program software yang digunakan dan menafsirkan hasilnya dan diakhiri dengan konfirmasi hasil penelitian dengan hipotesis yang pernah dibuat.

Akhirnya simpulan singkat dan implikasi hasil penelitian diuraikan di Bab V dan diungkapkan pula keterbatasan penelitian serta agenda untuk penelitian berikutnya.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2. 1. Telaah Pustaka

##### 2.1.1. Karakteristik Pegadaian

Penggadaian atau *pawnbroking* baik di Indonesia maupun di negara lain, adalah perusahaan yang menyalurkan kredit dengan jaminan benda bergerak. Ahli sejarah keuangan menyelusuri kelahiran penggadaian bermula pada abad ke 15 di Italia (Caskey dan Zikmund, 1990, p.8) di kota Lombardia, Menurut Samuel Levine (Caskey, 1991, p.1) Isabella of Castile menggadaikan perhiasannya untuk membiayai pelayaran pertama Christopher Columbus yang kemudian menemukan benua Amerika.

*Pawnbroker* adalah orang yang menjalankan usaha penggadaian, dan *pawnshop* adalah tempat usahanya (Chambers Essential English Dictionary, 1995, p.695) sedangkan *pledger* adalah orang yang menggadaikan. *Pawnshop* di sebagian besar wilayah Indonesia dikenal dengan Rumah Gadai sedangkan di Sumatra Utara, Malaysia dan Singapura disebut Pajak Gadai.

Menurut Caskey (1991), penggadaian adalah sumber kredit bagi jutaan orang yang tersisih dari *mainstream* institusi keuangan. Pelanggan penggadaian dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu : pertama, mereka yang disebabkan mempunyai resiko (tidak memenuhi syarat) sehingga bank tidak mau memberikan kredit. Dan kedua, adalah mereka yang datang ke

penggadaian karena diskresi mereka dan kemudahannya dimana uang kas dapat diperoleh dalam beberapa menit dengan sangat sedikit pertanyaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Syedain (1991), bahwa sangat banyak *pawnbrokers* hanya menerima barang-barang perhiasan (jewelry), emas dan perak. Jadi pegadaian adalah bagi kaum kaya dan miskin.

Tetapi menurut Caskey, sebagian besar adalah kelompok pertama, yang dicirikan sebagai orang yang berpenghasilan rendah dan kurang berpendidikan, kelas menengah yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Mereka tidak menggunakan rekening bank atau kartu kredit untuk pembayaran-pembayarannya, melainkan dengan uang kas.

Barang-barang yang pada umumnya dijadikan jaminan adalah emas, perhiasan, elektronik rumah tangga, senjata api, *camera* dan alat musik. Beberapa rumah gadai papan atas mengkhususkan diri pada pemberian pinjaman cepat dengan jaminan perhiasan mahal, benda-benda seni tingkat tinggi, *furniture* antik, pedang samurai, roll royce corniches, hingga helikopter. Kebanyakan pemiliknya mengatakan ada permintaan yang kuat dari peminjam-peminjam yang sophisticated (Brown, 1991).

Namun image masih merupakan kendala bagi penggadaian, seperti di Inggris (Syedain, 1991), sedangkan di Amerika menurut Welles (1990), sektor bisnis penggadaian masih dipandang dengan kecurigaan. Sementara menurut laporan Hartati (2000), sama halnya dengan di Indonesia, di Malaysia budaya malu untuk datang ke Pajak Gadai masih kental namun di Singapura tidak.



Baik di Inggris maupun Amerika bisnis penggadaian berada dibawah *usury law* (undang-undang riba) sementara di RRC penggadaian dilarang sejak tahun 1949 hingga tahun 1990-an bersamaan dengan pelarangan praktek riba, perjudian dan prostitusi (Anonymous, 1993).

Di negara-negara Eropa Kontinental dan Amerika Latin banyak lembaga swasta dan Pemerintah mengoperasikan rumah gadai nonprofit sebagai layanan masyarakat, namun di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, Singapura dan Thailand hampir seluruh rumah gadai adalah milik swasta dan untuk mencari keuntungan (berbagai sumber). Beberapa Pemerintah negara bagian di Amerika, menentukan tingkat bunga yang diperbolehkan dan meminta bila ada surplus dari penjualan barang jaminan dikembalikan kepada sipeminjam, dan meminta rumah gadai untuk setiap hari atau minggu melaporkan barang-barang yang digadaikan dan identitas sipenggadai kepada Kepolisian setempat.

### **2.1.2. Kredit Penggadaian**

Dalam The Weekly Corporate Growth Report (Oktober, 1998) disebutkan bahwa salah satu alasan pertumbuhan industri Pegadaian adalah bahwa menggadaikan merupakan cara mudah untuk memperoleh pinjaman kecil. Yang dibutuhkan hanya *copy* surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk atau cap sidik jari. Bank tidak dapat memberikan pinjaman kecil dikarenakan struktur biaya *overheadnya*. Sedangkan Pegadaian dapat

membuat pinjaman skala kecil dikarenakan tidak ada proses aplikasi kredit, dimana pinjaman semata-mata didasarkan pada nilai barang yang ditinggal sebagai jaminan.

Proses menggadaikan adalah sederhana, orang yang membutuhkan dana membawa barang ke Pegadaian. Pegadaian akan menilai dan menawarkan pinjaman jangka pendek terhadap barang tersebut. Biasanya jangka waktu pinjaman 3 sampai 6 bulan dan dapat diperpanjang (digadai ulang) beberapa kali tergantung nilai atau kondisi barang yang dijaminkan.

Di Amerika Serikat menurut Caskey (1991), peminjam dikenakan bunga antara 1,5% hingga 25% per bulan termasuk biaya penyimpanan dan asuransi, tergantung peraturan Pemerintah negara bagian. Beberapa negara bagian tidak membatasi bunga, dan pembatasan bunga banyak yang dilanggar. Di Inggris penggadaian mengenakan bunga antara 3% - 4% sebulan, tergantung dari jumlah uang yang dipinjamkan (Syedain, 1991), sementara di Kuala Lumpur Pajak Gadai menerapkan bunga 2% per bulan. Penggunaan kredit oleh peminjam tidak pernah ditanyakan. Pinjaman hanya didasarkan pada perkiraan nilai jual kembali barang yang dijaminkan.

Di Amerika Serikat rasio uang pinjaman terhadap nilai barang jaminan biasanya pada kisaran 50% sampai 60% dari nilai jual kembali barang jaminan, dan 70 – 80% peminjamnya kembali menjadi nasabah (Caskey dan Zikmund, 1990). Apabila pinjaman tidak dibayar kembali pada akhir periode, Pegadaian akan menjual barang yang dijaminkan untuk membayar pinjaman.

### **2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perekonomian yang tumbuh akan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi penduduk negara / daerah yang bersangkutan. Alat pengukur pertumbuhan ekonomi ada beberapa macam dan diantaranya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah / daerah dalam periode tertentu.. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS Jawa Tengah, 2000)

Ada dua macam PDRB, yaitu PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku (current price) pada setiap tahun, dan PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan suatu tahun tertentu. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi, yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Sedangkan PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui **pertumbuhan riil** agregat ekonomi dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

### **1) Menurut Pendekatan Produksi :**

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

### **2) Menurut Pendekatan Pendapatan :**

PDRB adalah balas jasa yang diterima oleh masing-masing individu pemilik faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah dalam bentuk upah dan gaji bagi rumah tangga, sewa bagi pemilik tanah dan peralatan, bunga bagi pemilik modal dan keuntungan atau laba bagi perusahaan (sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya). Apabila ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung, maka akan diperoleh PDRB.

### **3) Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah penjumlahan dari pengeluaran semua unit-unit ekonomi yang ada dalam masyarakat. Ada 4 macam unit ekonomi, yaitu : rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri. Pengeluaran rumah tangga disebut konsumsi ©, pengeluaran perusahaan disebut investasi (I), pengeluaran pemerintah disebut pengeluaran pemerintah (G), dan pengeluaran luar negeri merupakan selisih antara ekspor dan impor (X-M). Sehingga notasi persamaannya adalah :  $PDRB (Y) = C + I + G + (X-M)$ .

### **Pengaruh PDRB terhadap Kredit Pegadaian :**

Dari definisi di atas, PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, maka diduga pada saat PDRB menurun, maka kredit Pegadaian akan meningkat. Dan sebaliknya apabila PDRB meningkat, maka kredit Pegadaian akan menurun.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syedain (1991), bahwa masa kesulitan ekonomi berarti bisnis yang bagus bagi *pawnbrokers* di Inggris. Dan juga seperti dinyatakan oleh Steiner dan Strischek (1992), bahwa walaupun keadaan ekonomi yang menurun telah mempunyai efek menghancurkan banyak bisnis, Penggadaian justru berkembang dengan baik. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif kondisi ekonomi terhadap kredit penggadaian.

Hal ini dapat terjadi, karena dengan turunnya produksi maka penerimaan dari pemilik faktor-faktor produksi (yaitu upah dan gaji untuk tenaga kerja, bunga bagi pemilik modal, sewa bagi pemilik alat-alat, dan terutama laba bagi pemilik keahlian/entrepreneur) menurun atau bahkan merugi. Maka untuk mencukupi kebutuhannya atau bahkan untuk menutup biaya produksinya (yang mungkin diambil dari sumber pinjaman lain) mereka memerlukan uang kas dengan menggadaikan barang yang dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syedain (1991), bahwa masa kesulitan ekonomi berarti bisnis yang bagus bagi *pawnbrokers* di Inggris.

#### **2.1.4. Pendapatan *per Capita***

PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya dan belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya, karena sesungguhnya kesejahteraan itu harus dinikmati oleh setiap penduduk daerah yang bersangkutan, oleh karena itu harus mempertimbangkan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. Untuk itu PDRB per capita atau pendapatan percapita lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Pendapatan *per capita* (*income per capita*) adalah indikator ekonomi yang diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang ada pada pertengahan tahun. Sebagaimana PDRB, *income per capita* atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui laju pertumbuhan nyata kesejahteraan penduduk suatu daerah dari tahun ke tahun.

#### **Pengaruh Pendapatan *per Capita* terhadap Kredit Pegadaian :**

Dengan melihat karakteristik nasabah Penggadaian di muka, dimana yang terbanyak adalah dari kelompok pertama yaitu mereka yang exclude dari mainstream perbankan, karena antara lain berpenghasilan rendah, maka diduga pendapatan *per capita* berpengaruh negatif terhadap kredit penggadaian. Atau dengan kata lain, apabila pendapatan per capita turun, maka kredit penggadaian akan meningkat, dan sebaliknya, apabila pendapatan per capita naik maka akan menurunkan kredit Pegadaian.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dengan meningkatnya pendapatan, mereka dianggap tidak beresiko lagi untuk memperoleh kredit bank dan seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka kebutuhan-kebutuhan kasnya dapat ditutup dengan pendapatannya.

#### **2.1.5. Tingkat Pengangguran**

Prestasi perekonomian secara makro dapat dinilai dari tingginya tingkat pengangguran (Suparmoko, 1990) atau dengan kata lain bahwa tingkat pengangguran dapat mencerminkan adanya gelombang naik turunnya kegiatan ekonomi (*cyclical effect*).

Tingkat pengangguran adalah prosentase penduduk yang mencari pekerjaan terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang selama satu minggu sebelum pencacahan (pendataan) bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

#### **Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kredit Pegadaian**

Dari definisi di atas, orang yang menganggur berarti tidak mempunyai pendapatan atau kehilangan pendapatan dan sedang mencari pekerjaan. Untuk keperluan konsumtif, modal usaha selama menganggur atau biaya mencari pekerjaan, diperlukan dana atau uang kas. Orang-orang ini tampaknya tidak

*eligible* untuk mengambil kredit di bank sehingga rumah gadai akan menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan kasnya. Mereka tidak menjual barangnya walaupun akan memperoleh uang lebih banyak, sebab dengan harapan pinjaman akan dibayar kembali apabila pendapatan telah diperoleh.

Dengan alasan tersebut maka diduga ada hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan kredit Pegadaian, dalam arti apabila pengangguran meningkat maka akan mempengaruhi peningkatan kredit Pegadaian. Dan sebaliknya apabila tingkat pengangguran menurun maka kredit Pegadaian akan menurun pula.

#### **2.1.6. Kredit Usaha Kecil.**

Melalui kebijakan PAKJAN 1990, Pemerintah telah mewajibkan kepada semua bank untuk menyalurkan minimal 20% dari total kreditnya untuk usaha kecil yang dikenal dengan skim Kredit Usaha Kecil (KUK).

Kredit Usaha Kecil mencakup : kredit untuk usaha produktif (kredit investasi dan modal kerja), KPR sampai dengan tipe 70, Ruko, dan Kredit tanpa melihat penggunaan (plafon maksimal Rp 25 juta). Kredit yang disebut terakhir, berdasarkan ketentuan KUK terbaru (Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001) dihapus.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan motivasi dan komitmen perbankan dalam pengembangan usaha kecil, Bank Indonesia melalui surat



keputusan Direksi No. 30/4/KEP/DIR/ tanggal 4 April 1997 telah melakukan penyempurnaan ketentuan pemberian KUK.

Pokok-pokok penyempurnaan tersebut antara lain :

- a. Semua bank dikenakan kewajiban pemenuhan KUK, termasuk bank asing dan bank campuran.
- b. Kewajiban KUK dihitung atas dasar prosentase tertentu dari jumlah ekspansi kredit bank-bank, termasuk surat berharga, yang diberikan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing, pada setiap tahun takwim.
- c. Plafon maksimum KUK dinaikkan dari Rp 250 juta menjadi Rp 350 juta, antara lain dengan mempertimbangkan inflasi selama beberapa tahun terakhir.
- d. Bank tetap dapat memberikan KUK melalui kerjasama dengan bank lainnya, BPR atau Lembaga Pembiayaan dalam bentuk : pemberian kredit kepada BPR, pembiayaan bersama (joint financing), penerusan kredit (channeling) dan pengambilalihan kredit.
- e. Kriteria Usaha Kecil, yang semula usaha yang mempunyai total asset maksimum Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan yang ditempati, disesuaikan dengan UU No.9/1995 tentang Usaha Kecil, yaitu dengan kriteria sbb. :
  - Kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta, di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan maksimal Rp 1 miliar per tahun.
  - Milik WNI

- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Data dari Bank Indonesia penyaluran kredit di seluruh Indonesia pada akhir Desember 1996 mencapai Rp 30,4 triliun dengan 7,2 juta rekening. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar KUK dinikmati oleh usaha kecil yang plafon kreditnya rata-rata sebesar Rp 4,2 juta per nasabah. Apabila dilihat per sektor penyerapan terbesar adalah pada Sektor Lain-lain (38%) dimana di dalamnya termasuk kredit konsumsi sampai dengan Rp 25 juta dan termasuk kredit untuk subsektor perumahan. Sektor lainnya adalah Pertanian (8%), Perindustrian (6,8%), perdagangan, restoran dan hotel (30,4%), dan jasa-jasa (16,7%). Data lain menunjukkan sektor konsumsi terus mengalami peningkatan, sehingga pangsaanya mencapai 36,7% pada Desember 1996.

Data dari Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa walaupun posisi KUK di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan, namun pertumbuhan tahunan KUK di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Beberapa hal yang mendorong perkembangan tersebut disebutkan antara lain : meningkatnya kerjasama antara Bank Umum dengan BPR (yang pada

umumnya berorientasi di pedesaan), dan pembentukan unit-unit khusus dan perluasan kantor-kantor cabang Bank Umum di daerah pedesaan.

Pengaruh Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit Pegadaian :

Dengan melihat karakteristik dan data realisasi Kredit Usaha Kecil tersebut, dapat diduga bahwa ada hubungan negatif antara KUK dengan kredit Pegadaian dalam arti ekspansi atau kenaikan kredit Usaha Kecil akan mempengaruhi penurunan kredit Pegadaian. Dan sebaliknya penurunan atau kontraksi kredit Usaha Kecil akan mempengaruhi peningkatan kredit Pegadaian. Alasan yang mendasari hal ini adalah, kredit konsumsi (yang porsinya terbesar dari penyaluran KUK), rata-rata pinjaman Rp 4,2 juta per nasabah dan perkembangan operasi KUK di pedesaan, ada kesamaan dengan karakteristik kredit Pegadaian.

## 2. 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Caskey (1991) berjudul *Pawnbroking in America : The Economics of a Forgotten Credit Market*, adalah tentang apakah pegadaian (*pawnbroking*) di Amerika suatu bisnis yang *cyclical* (dalam arti dipengaruhi oleh naik turunnya indikator ekonomi) sebagaimana bank. Penelitian ini menggunakan sampel pegadaian-pegadaian yang ada di negara bagian Indiana dan Oregon, dengan data selama 30 tahun terakhir. Sebagai *dependent variable* digunakan *average loan* (rata-rata uang pinjaman) sedangkan sebagai *explanatory variable* digunakan *per capita income* dan

*unemployment* (tingkat pengangguran) negara bagian yang bersangkutan. Dengan analisis regresi Caskey mengungkapkan bahwa baik di Indiana maupun di Oregon, pinjaman pegadaian bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Di negara bagian Indiana koefisien estimasi untuk *per capita income* dan *unemployment* secara statistik signifikan sedangkan di Oregon tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sapphry (1997) yang berjudul *Informal Finance : A Study of the Indonesian Pawnshop (1952-1996)* dimaksudkan untuk mengukur kuat tidaknya hubungan antara variabel-variabel : Pinjaman Pegadaian, Pinjaman bank dan Produk Domestik Bruto (bukan hubungan sebab akibat diantara mereka). Data yang digunakan adalah saldo pinjaman Pegadaian dan outstanding loan bank secara nasional dan PDB Indonesia selama 45 tahun terakhir (1952 – 1996). Dengan analisis statistik koefisien korelasi Sapphry mengungkapkan bahwa hubungan antara (1) kredit Pegadaian dan kredit bank, (2) kredit Pegadaian dan PDB, dan (3) kredit bank dan PDB pada 45 tahun terakhir masing-masing sangat kuat.

Penelitian Bobby (1999), menganalisis pengaruh variabel-variabel tingkat suku bunga kredit perbankan dan indeks harga konsumen terhadap permintaan kredit Pegadaian di Cabang Kalibanteng (Semarang). Bobby menggunakan data tingkat suku bunga kredit perbankan dan indeks harga konsumen (IHK) bulanan selama 23 bulan (dari Pebruari 1997 sampai Desember 1998). Dengan analisis regresi Bobby mengungkapkan bahwa ada

pengaruh positif yang signifikan antara tingkat suku bunga kredit perbankan dengan permintaan kredit Pegadaian, sedangkan untuk IHK ada pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Apabila diringkas dalam suatu tabel maka faktor-faktor yang mempengaruhi kredit Pegadaian dari penelitian sebelumnya, adalah sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Pegadaian

Peneliti / Tahun	Geo Place	Variabel yang Digunakan	Variabel yang Signifikan
Caskey, 1991	Indiana	Per capita income, Tingkat Pengangguran	Per capita income dan Tingkat pengangguran
Caskey, 1991	Oregon	Per capita income dan Tingkat pengangguran	Tidak ada Yang signifikan
Caskey, 1991	United States	Tk.bunga,tk.kemiskinan tk.pendidikan, tk.kepada-Datan penduduk.	Tk.bunga,tk.kemiskinan dan tk.pendidikan
Bobby, 1999	Pegadaian Kalibanten, Sng.	Tk.bunga dan IHK (indek harga konsumen)	Tk. Bunga

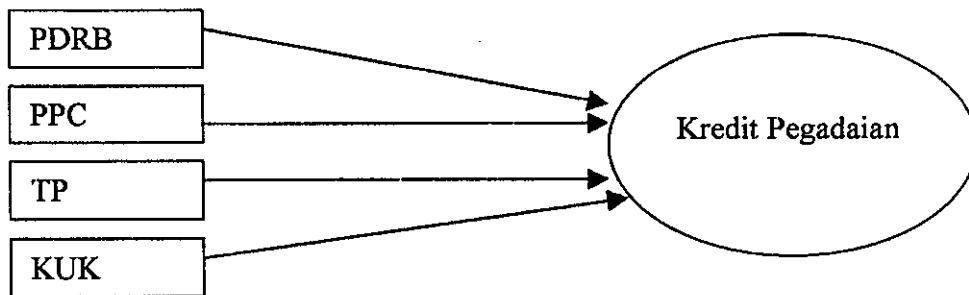
Riset tentang penggadaian di Inggris menunjukkan penurunan yang tajam dalam industri sejak awal abad yang lalu (Caskey, 1991 : 11). Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Minkes, bahwa pada tahun 1950 di Inggris hanya ada 32% penggadaian dari yang ada pada tahun 1913 dan menurut Lohr

pada tahun 1991 ada 175 penggadaian beroperasi di sana dibandingkan dengan 3.000 penggadaian pada tahun 1900. Minkes, Hudson dan Tebbutt (Caskey, 1991 : 11) melaporkan penciutan penggadaian di Inggris ada hubungannya dengan tumbuhnya sumber kredit konsumsi baru, meningkatnya pendapatan per capita, meningkatnya ukuran kemakmuran masyarakat, dan tumbuhnya rasa cacat di masyarakat (social stigma) untuk menggunakan atau masuk dalam profesi penggadaian.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, persamaan : a) dengan penelitian Caskey dan Bobby sama-sama menganalisis pengaruh indikator ekonomi makro terhadap variasi kredit Pegadaian dan b) dengan penelitian Caskey sebagai indikator ekonomi makro sama-sama menggunakan proksi pendapatan per capita dan tingkat pengangguran. Sedangkan perbedaannya : a) penelitian Bobby sebagai proksi indikator ekonomi makro digunakan tingkat bunga dan IHK, b) penelitian Sapphry menganalisis hubungan antara Kredit Pegadaian dengan PDB dan Kredit Pegadaian dengan Kredit Bank, c) *Geo place* penelitian Caskey di US, penelitian Sapphry menggunakan kredit Pegadaian seluruh Indonesia, dan penelitian Bobby studi kasus di Cabang Kalibanteng.

### **2. 3. Kerangka Pikir**

Dari model dan hipotesis di atas, maka kerangka pikir teoritis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana pada halaman berikut :



Gambar : 2.1  
Pengaruh PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran  
dan Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit Pegadaian.

## 2. 4. Model dan Hipotesis

### 2. 4.1 Model Penelitian

Dari hubungan atau pengaruh-pengaruh yang diduga terjadi tersebut di atas, yaitu antara PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit Pegadaian, maka dapat digambarkan model persamaan regresinya sebagai berikut :

$$KP = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PPC + \beta_3 TP + \beta_4 KUK + e$$

Dimana :

Sebagai *dependent variabel* Kredit Pegadaian (KP) dan sebagai *explanatory* atau *independent variabel* adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan per Capita (PPC), Tingkat Pengangguran (TP) dan Kredit Usaha Kecil (KUK). Sedangkan :  $\alpha$  = konstanta,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  dan  $\beta_4$  = koefisien regresi (slope) dan  $e$  = variabel pengganggu.

#### **2. 4 2. Hipotesis**

Dari hubungan-hubungan dalam arti pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

Ha1 : PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kredit Pegadaian.

Ha2 : Pendapatan per Capita berpengaruh secara signifikan terhadap kredit Pegadaian.

Ha3 : Tingkat Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kredit Pegadaian.

Ha4 : Kredit Usaha Kecil berpengaruh secara signifikan terhadap kredit Pegadaian.

Ha5 : PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan Kredit Usaha Kecil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Kredit Pegadaian.





### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **3. 1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data mengenai kredit Pegadaian adalah merupakan data primer yang diperoleh dari PERUM Pegadaian Kantor Wilayah Semarang, dimana penelitian dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen-dokumen perusahaan. Data PDRB, Pendapatan per Capita, dan Tingkat Pengangguran merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan data Kredit Usaha Kecil (KUK) merupakan data sekunder juga yang diperoleh dari Bank Indonesia Semarang.

#### **3. 2. Populasi**

Oleh karena penelitian ini adalah studi kasus, maka seluruh populasi diteliti, atau tidak ada sample. Populasi di sisi variabel dependent yang diteliti adalah kredit yang disalurkan oleh Cabang PERUM Pegadaian diseluruh Kantor Wilayah Semarang, yang disalurkan oleh 53 Cabang Pegadaian yang tersebar di 12 kabupaten di Jawa Tengah selama periode 5 tahun (dari tahun 1996 s.d 2000). Sedangkan di sisi variabel independent yang diteliti data PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan Kredit Usaha Kecil yang disalurkan oleh bank-bank, di 12 kabupaten di Jawa Tengah selama 5 tahun (periode tahun 1996 s.d 2000).

### **3. 3. Definisi Operasional Variabel**

Sehubungan dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, disini akan diberikan definisi operasional variabel-variabel yang akan diproses dalam komputasi data, yaitu yang dimaksud dengan :

1. Kredit Pegadaian adalah jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah oleh PERUM Pegadaian Kantor Wilayah Semarang dalam satuan jutaan rupiah.
2. PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto yang dinilai atas dasar harga konstan tahun 1993 (dalam jutaan rupiah).
3. Pendapatan per Capita adalah pendapatan per capita yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 1993 (dalam jutaan rupiah).
4. Tingkat Pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yaitu usia 10 tahun ke atas yang seminggu yang lalu mencari pekerjaan (dalam satuan orang).
5. Kredit Usaha Kecil adalah kredit dalam uang rupiah yang disalurkan oleh bank-bank Pemerintah maupun Swasta yang memenuhi kriteria kredit usaha kecil berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dalam satuan jutaan rupiah.

### **3. 4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak yang berkompeten di obyek penelitian untuk kemudian dilakukan studi dokumen.

### **3. 5. Teknik Analisis**

#### **3. 5.1. Uji Asumsi Klasik**

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (ordinary least square), merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik apabila dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik (Algifari, 2000, p.83). Pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan terhadap model hasil penelitian ini terdiri dari : (1) Uji Multikolinearitas, (2) Uji Autokorelasi, (3) Uji Heteroskedastisitas dan (4) Uji Normalitas Data.

##### **1. Uji Multikolinieritas**

Uji ini diperlukan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat dari : (1) nilai tolerance dan (2) variance inflation factor (VIF) sebagai lawannya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independent yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai cutoff yang biasa dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau nilai  $VIF=10$ . Jadi model yang tidak terdapat problem multikolinieritas apabila nilai tolerance tidak kurang dari 0,10 dan nilai VIFnya tidak lebih dari 10.

##### **2. Uji Autokorelasi**

Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada suatu periode dengan

kesalahan pada periode sebelumnya. Hal ini sering terjadi pada data *time series* dan jarang terjadi pada data *cross section*. Jika hal ini terjadi maka ada problem autokorelasi dan model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi akan digunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order auto correlation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi, dan tidak ada variabel lag diantara variabel bebas.

Pengambilan keputusan :

- a. bila nilai DW terletak antara batas atas (upper bound /  $du$ ) dan  $(4-du)$  maka tidak ada auto korelasi atau koefisien autokorelasi = 0.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah (lower bound /  $dl$ ) maka ada autokorelasi positif. Atau koefisien autokorelasi lebih besar dari 0.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari 0, berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak antara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ), atau DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section*

mengandung situasi heteroskedastisitas, karena menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas antara lain dengan :

Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Pada grafik scatter plot, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di standardized.

Dasar analisis :

- a. jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, dan / dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Normalitas Data

Uji normalitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi *dependent variable* dan *independent variable* keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi *data dependent variable* dan *independent variable* normal atau tidak, akan dilakukan dengan dua cara yaitu : (1) dengan melihat histogram dan (2) dengan melihat *normal probability* plotnya.

Histogram akan membandingkan antara data observasi dengan frekuensi distribusi yang mendekati normal. Sedangkan *normal probability plot* membandingkan

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal yang merupakan garis lurus diagonal.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **3.5.2. Uji Hipotesis**

Untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab II, akan dilakukan dengan : (1) Uji Signifikansi Parameter Individual, (2) Uji Signifikansi Simultan, dan (4) Pengukuran Koefisien Determinasinya.

#### **1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan, bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima Cara pengujiannya akan dilakukan dengan membandingkan nilai t statistik dengan titik kritis menurut table (t table). Jika t statistik (t hasil perhitungan) lebih

tinggi atau lebih besar secara absolut dari  $t$  table, maka hipotesis alternatif atau  $H_a$  (yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen) diterima.

Sebaliknya apabila  $t$  hitung absolut lebih kecil dari  $t$  tabel, maka  $H_0$  (yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen) diterima .

## **2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (dependen). Cara pengujiannya akan dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F table. Bila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai menurut F table (F kritis), maka  $H_a$  (yang menyatakan semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat) diterima.

Sebaliknya bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka  $H_0$  (yang menyatakan bahwa semua parameter dalam model / variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat) diterima atau  $H_a$  ditolak.

## **3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat atau dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantar 0 dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat



terbatas, sedangkan apabila  $R^2$  mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Secara umum koefisien determinasi untuk data *cross section* relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data *time series* biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh karena itu pada saat mengevaluasi seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, akan digunakan *adjusted  $R^2$*  sebagaimana anjuran para peneliti.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **4. 1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4. 1. 1. Sejarah Singkat PERUM Pegadaian**

Usaha pegadaian dikenal secara resmi di Indonesia sebagai Bank Van Leening di zaman VOC (tahun 1746 – 1811). Peran utamanya adalah menyediakan pinjaman kepada rakyat miskin yang sering terjerat oleh praktek lintah darat. Bank ini pertama kali didirikan Batavia pada saat Gubernur Belanda Van Imhoff pada tanggal 20 Agustus 1746 sebagai usaha patungan antara Pemerintah Belanda dengan swasta, dengan perbandingan kepemilikan  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$  masing-masing. Akan tetapi sejak tahun 1794 kepemilikan bank berubah dan menjadi secara keseluruhan dikuasai dan dimonopoli oleh Pemerintah.

Selama Pemerintahan Inggris (1811 – 1816) yang singkat, Bank Van Leening dihapuskan. Hal ini dikarenakan Gubernur Raffles merasa bank ini tidak seharusnya dikuasai oleh Pemerintah, yang kemudian memberikannya kepada swasta dengan lisensi. Dengan keterlibatan Pemerintah melalui perizinan, diharapkan tetap dapat melindungi rakyat dari praktek-praktek lintah darat dan sejenisnya. Namun dalam pelaksanaannya para pemegang lisensi ini melakukan praktek-praktek yang merugikan rakyat. Mereka beroperasi hanya demi kepentingannya dan mengabaikan tujuan utama bank yaitu memberikan pinjaman jangka pendek kepada orang tidak berpunya dengan harga yang wajar. Mereka mengenakan tarif bunga yang lebih

tinggi dari yang diinginkan Pemerintah, tidak melelang barang jaminan yang tidak ditebus, dan mereka melakukan malpraktek lainnya. Akhirnya pada tahun 1814 sistem lisensi dihapuskan dan diganti dengan Pacht Stelsel, yaitu hak mendirikan Penggadaian oleh umum dengan membayar sejumlah uang kepada Pemerintah. Pacht Stelsel ini berjalan hingga tahun 1843 di sebagian besar wilayah Indonesia.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yang kedua (1816 – 1945) Pacht Stelsel dianggap tidak mengurangi lintah darat dan mengurangi pendapatan pemerintah, oleh karena itu timbul kembali gagasan semula bahwa bisnis penggadaian seharusnya dijalankan oleh pemerintah dengan cara monopoli. Maka pada tanggal 1 April 1901 didirikanlah Pegadaian Negeri pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Pada tahun 1921 dibawah IBW (*Indonesische Bedrijvenwet*) atau Hukum Perusahaan Indonesia *article* no.28/1921 dan 420/1921 monopoli usaha penggadaian oleh Pemerintah diperluas hingga ke luar Jawa dan Madura hingga ke seluruh Indonesia. Maka sejak 1921 Pegadaian swasta tidak diperbolehkan lagi beroperasi bahkan ada sanksi hukumnya bagi yang melanggar. Ketentuan ini diatur dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau KUHPidana bab 509. Penguasaan oleh Pemerintah Belanda atas penggadaian berlangsung terus hingga kemerdekaan Indonesia dan diteruskan oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai badan usaha Pegadaian beberapa kali mengalami perubahan bentuk sesuai dengan status pengelolanya seiring dengan perubahan peraturan yang berlaku. Dengan *staatsblad* 1930 No.226 menjadi Jawatan Pegadaian, dengan Peraturan Pemerintah R.I Tahun 1961 No. 178 berubah menjadi

Perusahaan Negara Pegadaian. Pada tahun 1969 dengan keluarnya Undang-undang No.9 Tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk badan usaha negara menjadi tiga, yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka dengan Peraturan Pemerintah No.7 tanggal 11 Maret 1969, P.N.Pegadaian berubah menjadi PERJAN Pegadaian.

Hingga pada tahun 1990 untuk memberikan keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah dengan P.P. No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 merubah status PERJAN Pegadaian menjadi PERUM Pegadaian, hingga saat ini.

#### **4.1.2. Pengertian dan Fungsi PERUM Pegadaian**

PERUM Pegadaian adalah perusahaan atau badan usaha milik negara (BUMN) yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman (kredit) dengan jaminan benda bergerak atas dasar hukum gadai. Hukum gadai yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdara, yang mengatur tentang Gadai (Subli, 1992, p.3).

Sebagai implikasinya, operasional Pegadaian harus tunduk terhadap undang-undang tersebut yang mengatur hak-hak dan kewajiban kreditur (Pegadaian) dan debitur (peminjam) antara lain sebagai berikut (Sapphry, 1997, p. 51-52) :

- a. Peminjam memberikan *asset* secara phisik sebagai jaminan yang akan ditahan oleh Pegadaian hingga pokok pinjaman dan bunganya dibayar.

- b. Pegadaian tidak boleh menggunakan barang yang dijaminkan untuk keperluannya, dan apabila kedapatan barang yang dijaminkan rusak atau hilang, Pegadaian berkewajiban untuk menggantinya.
- c. Dalam hal terjadi sipeminjam tidak melaksanakan kewajibannya atau *default*, sebagai kreditur Pegadaian mempunyai prioritas pertama dalam hal pembayaran hutang dengan menjual barang jaminan melalui lelang.
- d. Debitur berhak atas uang kelebihan apabila lakunya lelang barang jaminan melebihi dari pokok pinjaman dan bunganya setelah dikurangi dengan biaya lelang.

Fungsi atau tujuan PERUM Pegadaian sebagaimana tercantum pada PP.10/1990 pasal 5 ayat 2 adalah :

- 1. Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2. Mencegah praktek ijon, Pegadaian gelap, riba, pelepas uang dan pinjaman tidak wajar lainnya.

#### **4.1.3. Kegiatan Usaha Pegadaian**

Pelayanan yang disediakan oleh PERUM Pegadaian seluruhnya ada lima, yaitu Jasa Gadai, Jasa Taksiran, Jasa Titipan, Toko Emas, dan Koin Emas ONH.

### **1. Jasa Gadai**

Jasa Gadai adalah merupakan usaha pokoknya yaitu menyalurkan kredit dengan jaminan benda bergerak atas dasar hukum gadai. Artinya si debitur atau peminjam/penggadai menyerahkan harta geraknya sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya sekaligus memberi kuasa kepada kreditur (Pegadaian) untuk menjual (melelang di depan publik) jika setelah jatuh tempo kredit debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya ditambah bunganya yang disebut sewa modal. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan diserahkan kepada si penggadai. Sedangkan kalau kurang, menjadi resiko bisnis Pegadaian.

### **3. Jasa Taksiran**

Suatu jasa atau layanan yang disediakan kepada masyarakat yang peduli akan nilai atau kualitas perhiasannya. Dengan membayar fee tertentu masyarakat dapat mengetahui kadar atau karatase perhiasan emas, permata atau batu berliannya setelah terlebih dahulu dicek oleh Juru Taksir yang berpengalaman. Kepastian kualitas suatu barang dapat memberikan rasa aman dan kepastian bahwa barang tersebut mempunyai nilai investasi.

### **4. Jasa Titipan**

Untuk menjamin rasa aman dan tenang kepada masyarakat yang memiliki benda-benda atau dokumen berharga (apalagi apabila hendak meninggalkan rumah cukup lama) PERUM Pegadaian menyediakan jasa penitipan barang; dengan fee tertentu dan prosedur yang mudah.

## **5. Toko Emas Galery 24**

Di Cabang-cabang tertentu, Pegadaian juga mempunyai toko emas yang disebut Galery 24. Perhiasan emas yang ada di toko emas Pegadaian merupakan barang yang sama sekali baru (bukan barang sisa lelang) dan dijamin karatasenya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## **6. Koin Emas ONH**

Merupakan jasa layanan cara menabung (terutama untuk ongkos naik haji) yang nilai rupiahnya tidak termakan oleh inflasi. Berdasarkan data di PERUM Pegadaian, dengan jumlah antara 250 – 260 gram, sudah dapat naik haji. Sebagaimana diketahui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) oleh Pemerintah ditentukan dalam kurs USD, dan harga emas berfluktuasi sesuai dengan harga kurs USD. Koin ini juga dapat digunakan sebagai souvenir maupun koleksi pribadi / investasi yang sewaktu-waktu apabila membutuhkan dana mendesak dapat dijual ataupun dijaminkan di Pegadaian.

### **4.1.4. Operasional Jasa Gadai**

Usaha PERUM Pegadaian adalah menyediakan pinjaman berskala kecil dan dalam jangka pendek kepada orang-orang yang membutuhkan dana kas segera dengan prosedur dan proses yang mudah dan cepat,

Syarat kredit cukup membawa barang jaminan dan foto copy KTP atau identitas lain. Kecuali untuk barang jaminan mobil diperlukan cek legalitas ke Samsat dimana BPKB dan STNK dikeluarkan.

Barang-barang yang dapat dijaminkan : perhiasan emas, perak dan platina, barang-barang elektronik rumah tangga (radio, tape, TV, video, blender, dsb.), barang-barang pecah belah, mesin jahit, pompa air, diesel, generator, tekstil, kain, permadani, kendaraan sepeda, sepeda motor dan mobil.

Barang-barang yang tidak diterima sebagai jaminan : barang milik instansi pemerintah maupun swasta, barang yang mudah rusak, barang yang dilarang diperjual belikan seperti senjata api, barang-barang yang membahayakan, buku-buku dan barang purbakala.

Golongan uang pinjaman, jangka waktu kredit dan tingkat bunga pinjaman (sewa modal) sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Golongan Kredit, Sewa Modal, Jangka Waktu Kredit dan Bea Asuransi

Golongan Kredit (Rp.)	Sewa Mo - dal per 15 hari.	Jangka Waktu	Bea Penyimpanan Dan Asuransi (Rp.)
A. 10.000 – 40.000	1,25%	120 hari	Emas : 200,- Non Emas : 400,-
B. 40.500 – 150.000	1,50%	120 hari	Emas : 1.000,- Non Emas : 2.000,-
C. 151.000 – 500.000	1,75%	120 hari	Emas : 2000,- Non Emas : 4.000,-
D. 510.000 – 20 juta	1,75%	120 hari	Emas : 5.000,- UP > 1,5 juta : 0,5% x UP Non Emas : 6.000,-
> 20 juta	1,75%	120 hari	UP > 1,5 juta : 0,5% x UP Mobil minimal :25.000,-

Sumber : Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Semarang

Untuk menghindari resiko kebakaran dan kebongkaran (pencurian), barang jaminan nasabah di asuransikan.



Proses kredit hingga memperoleh uang kas dan proses penebusan rata-rata 20 menit, kecuali untuk memperoleh kredit dengan jaminan mobil karena perlu cek fisik dan dokumen ke Samsat, perlu waktu +/- setengah hari. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap nilai pasar barang jaminan berkisar 85% hingga 89% kecuali untuk barang jaminan emas ada tarip tersendiri tergantung harga emas pada saat penaksiran. Kredit yang jatuh tempo diberikan *grace period* 10 hari sebelum dilelang dan dapat diulang gadai (*roll over*) apabila barang jaminan dinilai masih *marketable*.

#### 4.1.5. PERUM Pegadaian Kantor Wilayah Semarang

PERUM Pegadaian Kantor Wilayah Semarang membawahi 53 Cabang Pegadaian yang tersebar di 14 kabupaten dan kota madya di sepanjang pantai utara Jawa Tengah. (secara terinci ada pada lampiran). Berdasarkan data bulan Agustus 2002 dan menurut Manajer Operasional karakteristiknya sama untuk lima tahun sebelumnya, porsi kredit per golongan yang disalurkan dan profesi nasabah adalah sbb. :

Tabel 4.2  
Kredit per Golongan dan Profesi Nasabah

Gol. Kredit (Rp.)	Prosentase	Profesi Nasabah	Prosentase
A. 10.000 – 40.000	7,10	Petani	33,42
B. 40.500 – 150.000	9,17	Nelayan	5,60
C. 151.000 – 500.000	26,69	Industri	4,23
D. 510.000 - $\geq$ 20 juta	57,04	Pedagang	17,92
		Karyawan, dll.	38,84
Total	100	Total	100

Sumber : PERUM Pegadaian Kantor Wilayah Semarang, diolah.

Sedangkan perkembangan kredit per golongan selama 5 tahun dari tahun 1997 s.d 2001 dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3  
Pertumbuhan Kredit Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Semarang  
Tahun 1997 s.d 2001

Kredit (Rpjuta)	1997	1998	1999	2000	2001	Average Growth (%)
Gol. A	16.634	17.485	20.831	24.968	28.637	111,06
Gol. B	27.638	30.284	30.842	33.050	36.495	105,94
Gol. C	29.136	53.891	53.259	66.666	91.122	132,77
Gol. D	28.579	65.658	73.075	113.333	166.713	151,42
Jumlah	101.987	167.318	178.007	238.017	322.967	129,57
Growth (%)	108,00	164,06	106,39	133,71	135,69	129,57

Sumber : Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Semarang, diolah.

Dari Tabel 4.3 di atas tampak, walaupun untuk semua golongan kredit mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan rata-rata tertinggi terjadi pada golongan D sebesar 51,42% yaitu untuk kredit Rp510 ribu s.d Rp20 juta atau lebih. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa ada pergeseran nasabah dari kelas yang lebih rendah ke golongan nasabah yang lebih tinggi.

4.2. Proses dan Hasil Komputasi Data

Pembahasan mengenai Proses dan Komputasi Data akan dimulai dengan melihat Koefisien Regresi, kemudian Koefisien Determinasi dan terakhir hasil Uji Asumsi Klasik.

4.2.1. Koefisien Regresi

Tabel 4.4  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	493,532	3391,314		,146	,885		
PDRB	-1,82E-03	,003	-,190	-,699	,487	,092	10,884
PPC	1,744E-03	,002	,166	,855	,396	,180	5,563
TP	,301	,129	,315	2,335	,023	,372	2,685
KUK	2,871E-02	,006	,656	4,825	,000	,366	2,730

a. Dependent Variable: KP

Dari hasil komputasi data pada Tabel 4.4 Coefficients dihasilkan model persamaan regresi linear (*unstandardized*) sebagai berikut :

$$KP = 493,532 - 0,0001816PDRB + 0,0001744PPC + 0,301TP + 0,002871KUK + e$$

Dimana :

KP = Kredit Pegadaian, PDRB = Produk Domestik Regional Bruto, PPC = Pendapatan per Capita, TP = Tingkat Pengangguran dan KUK = Kredit Usaha Kecil.

Adapun interpretasi hasil perhitungan dari koefisien regresi *unstandardized* adalah sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 493,532 menyatakan bahwa jika semua variabel independen dianggap konstan, maka kredit yang disalurkan kepada nasabah oleh PERUM Pegadaian Kantor Wilayah Semarang sebesar Rp493.532.000,-
2. Koefisien regresi PDRB menyatakan adanya pengaruh yang bersifat negatif Produk Domestik Regional Bruto terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian.
3. Koefisien regresi PPC menyatakan adanya pengaruh yang bersifat positif Pendapatan per Capita terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian.
4. Koefisien regresi TP menyatakan adanya pengaruh yang bersifat positif jumlah pengangguran terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian.
5. Koefisien regresi KUK menyatakan adanya pengaruh yang bersifat positif Kredit Usaha Kecil terhadap kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian.

#### **4.2.2. Koefisien Determinasi**

Dari Tabel 4.5 *Model Summary* berikut ini tampak besarnya  $R^2$  adalah 0,627 dan adjusted  $R^2$  sebesar 0,600. Menggunakan adjusted  $R^2$  untuk menghindari bias, maka hal ini berarti bahwa variasi permintaan Kredit Pegadaian 60 % dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas yang dimasukkan dalam model yaitu PDRB, PPC, TP dan KUK. Sedangkan sisanya 40 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 4.5

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,792 <sup>a</sup>	,627	,600	8.323,49	1,531

a. Predictors: (Constant), KUK, TP, PPC, PDRB

b. Dependent Variable: KP

#### 4.2.3. Uji Asumsi Klasik

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III bahwa untuk mengetahui apakah model yang dihasilkan merupakan *best linear unbiased estimator*, akan dilakukan uji asumsi klasik : 1) uji multikolinieritas, 2) uji autokorelasi 3) uji heteroskedastisitas 4) dan uji normalitas.

##### 1. Uji Multikolinieritas

Persamaan regresi yang baik ialah yang tidak ada multikolinieritas yang sempurna diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi keadaan ini akan dilakukan dengan : a). melihat  $R^2$  yang dihasilkan dibandingkan dengan banyaknya variabel bebas yang signifikan. b). melihat nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*.

Pada Tabel 4.5 *Model Summary* tampak  $R^2$  yang dihasilkan 0,627 tidak terlalu tinggi, sementara pada Tabel 4.4 *Coefficients* dari keempat variabel bebas ada 2 yang signifikan yaitu TP dan KUK dan 2 variabel bebas lainnya (yaitu PDRB dan PPC) tidak signifikan. Suatu model ada indikasi multikolinieritas adalah apabila nilai  $R^2$  yang dihasilkan sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebasnya

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan dari nilai *tolerance* pada Tabel 4.4 (*Coefficients*) menunjukkan hanya ada satu variabel bebas yaitu PDRB yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Sementara VIFnya juga hanya ada satu (yaitu PDRB) yang nilainya lebih dari 10. Sehingga dari kedua pengamatan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat indikasi adanya multikolinieritas yang serius pada model yang dihasilkan. Sedangkan untuk mengetahui variabel-variabel bebas manakah yang saling berkorelasi, dapat dilihat pada Lampiran *Coefficient Correlations*.

## 2. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, disini akan digunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah :

- a. Apabila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound ( $du$ ) dan  $(4-du)$  maka koefisien autokorelasi sama dengan nol atau tidak ada auto korelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, atau ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, atau berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak di antara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Menurut Tabel DW one tile test, untuk persamaan regresi dengan jumlah sampel 60, variabel bebas 4 dan significance level 5%, maka  $dl = 1,44$  dan  $du = 1,73$  atau  $(4 -$

$du) = 2,27$  dan  $(4-dl) = 2,56$ . Oleh karena nilai DW hasil perhitungan pada Tabel 4.5 (*Model Summary*) adalah sebesar 1,531 atau terletak diantara dl dan du, maka ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi yang dihasilkan tidak dapat disimpulkan.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas a.l dengan : Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Pada grafik scatter plot, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*.

Dasar analisis :

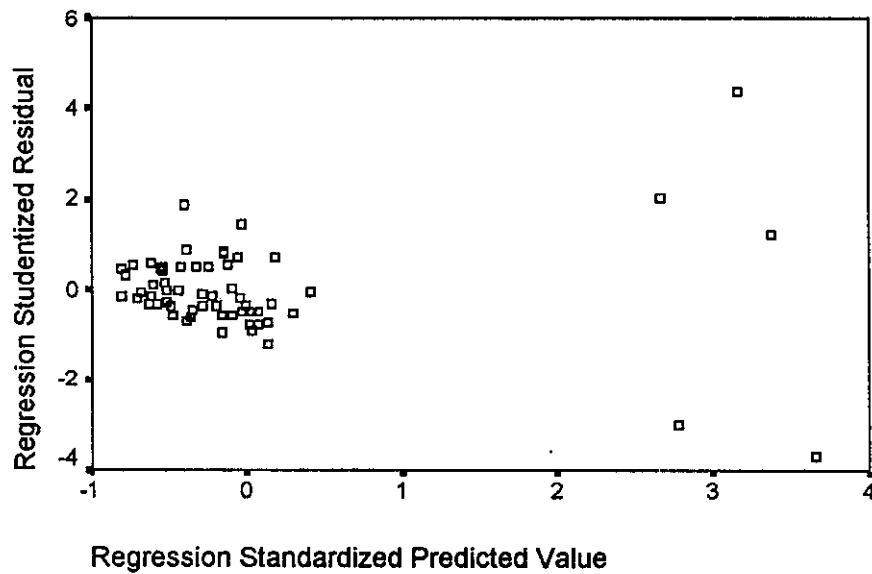
- a. jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, dan / dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari Gambar 4.1 Scatterplot berikut ini tampak bahwa tidak ada pola yang jelas dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa pada persamaan regresi yang dihasilkan oleh penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.1

## Scatterplot

Dependent Variable: KP



### 3. Uji Normalitas

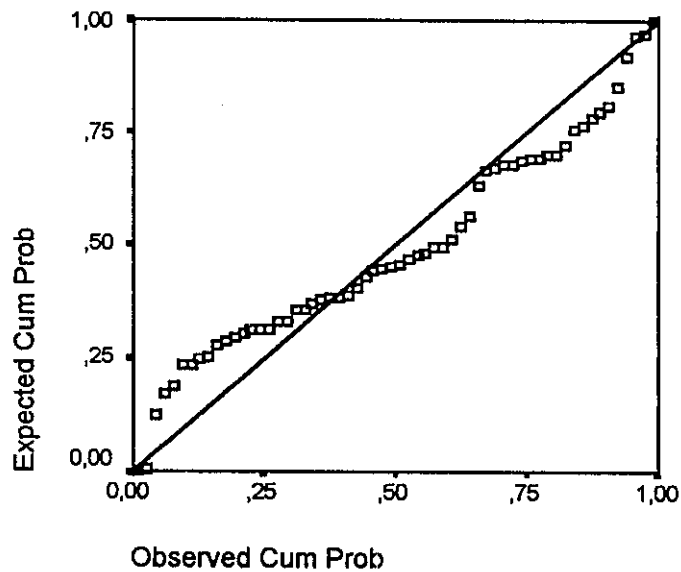
Menurut Ghazali (2001, p.79) pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan itu tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



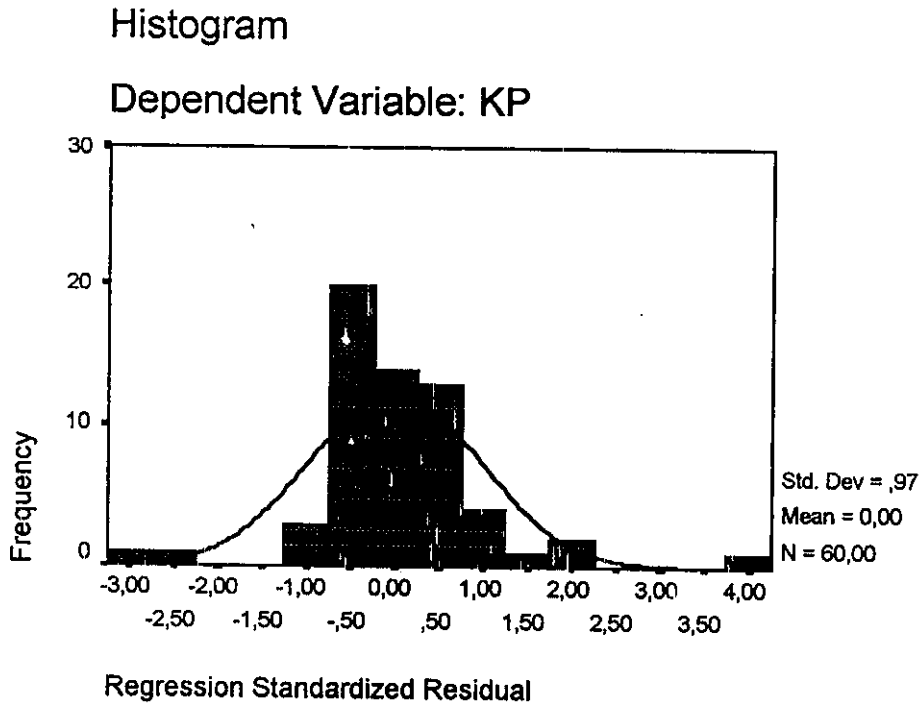
Gambar 4.2

Normal P-P Plot of Regression Standardized  
Dependent Variable: KP



Pada Gambar 4.2 grafik Normal Probability Plot di atas, tampak data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Sedangkan pada halaman berikut ini Gambar 4.3 grafik Histogram menunjukkan pola distribusi normal. Dari kedua gambar ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.3



### 4.3. Pengujian Hipotesis

Sebagaimana telah dirumuskan pada hipotesis dalam Bab II bahwa keempat variabel bebas baik secara individual maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk itu disini akan dilakukan : 1) Uji Signifikansi Parameter Individual, dan 2) Uji Signifikansi Simultan

#### 4.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual

##### 1. Pengaruh PDRB terhadap Kredit Pegadaian

Analisis :

1. Hasil komputasi data pada Tabel 4.4 *Coefficients*, tampak t hitung untuk PDRB sebesar  $-0,699$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,487$ .
2. Nilai kritis (t tabel) dari model regresi yang dihasilkan oleh penelitian ini ( yaitu dengan 60 pengamatan dan 5 parameter) dengan *significance level* 5%, adalah pada  $t_{(n-k); (\alpha/2)}$  atau pada tabel distribusi t terletak diantara 2,000 dan 2,009 karena degree of freedom yang ada 60 dan 50 sedangkan untuk penelitian ini seharusnya  $(n-k) = 55$ .

Hasil Analisis :

1. t hitung sebesar  $-0,699$  secara absolut jauh lebih kecil dari t tabel yang besarnya antara 2,000  $-2,009$ .
2. Dari komputasi data tingkat signifikansi yang dihasilkan sebesar  $0,487$  adalah jauh di atas 5%

Dari hasil analisis di atas, maka  $H_0$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak atau dengan kata lain hasil penelitian tidak setuju dengan hipotesis bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kredit Pegadaian. Dari koefisien regresi dapat diartikan bahwa PDRB mempunyai pengaruh negatif terhadap Kredit Pegadaian, namun tidak signifikan.

Hal ini dapat terjadi karena penerima terbesar balas jasa dalam PDRB adalah kelompok 2 s.d 4 yaitu pemilik modal, pemilik alat-alat dan pengusaha ditambah sebagian kelompok 1 yaitu tenaga kerja. Sebagian besar dari mereka mempunyai akses ke bank dan mempunyai kartu debit maupun kartu kredit.

Sehingga penurunan atau kenaikan pendapatan tidak mempengaruhi (secara signifikan) terhadap kredit Pegadaian, karena pada saat membutuhkan uang kas segera mereka dapat menggunakan kartu debit atau rekening banknya maupun kartu kreditnya.

Dengan prosedur yang sama untuk selanjutnya akan diuji  $H_{a2}$ ,  $H_{a3}$  dan  $H_{a4}$ .

## **2. Pengaruh Pendapatan per Capita terhadap Kredit Pegadaian**

Analisis :

1. Hasil komputasi data pada Tabel 4.4 *Coefficients*, tampak  $t$  hitung untuk PPC sebesar 0,855 dan tingkat signifikansi sebesar 0,396.
2. Nilai kritis ( $t$  tabel) untuk 60 pengamatan dan 5 parameter dengan *significance level* 5%, pada tabel distribusi  $t$  terletak pada :  $t_{(n-k); (\alpha/2)}$  atau diantara 2,000 dan 2,009.

Hasil Analisis :

1. Dari komputasi data dihasilkan tingkat signifikansi yang besar (0,396) yang jauh diatas 5%
2.  $t$  hitung sebesar 0,855 secara absolut lebih kecil dari  $t$  tabel yang besarnya antara 2,000 – 2,009.

Dari hasil analisis di atas, maka  $H_0$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak atau dengan kata lain hasil penelitian tidak setuju dengan hipotesis bahwa Pendapatan per Capita (PPC) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kredit Pegadaian. Dari koefisien regresi yang dihasilkan dapat diartikan bahwa pada saat Pendapatan

per Capita naik, maka kredit Pegadaian juga naik dan pada saat Pendapatan per Capita turun, maka Kredit Pegadaian juga turun, namun kenaikan atau penurunan kredit Pegadaian tidak signifikan.

Hal ini dapat terjadi dengan penjelasan sebagai berikut : pendapatan per capita pada umumnya dikelompokkan menjadi masyarakat berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi dan bagian terbesar masyarakat kita digolongkan berpenghasilan rendah apalagi setelah krisis. Dalam 10 tahun terakhir manajemen Pegadaian melakukan inovasi di bidang promosi, pelayanan dan sarana/prasarana untuk merubah paradigma bahwa Pegadaian adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah saja. Paradigma tersebut sekarang telah berubah sehingga kredit Pegadaian bukan hanya untuk keperluan konsumsi (memenuhi kebutuhan fisik minimum) masyarakat golongan berpenghasilan rendah, tetapi telah banyak digunakan oleh masyarakat golongan menengah pada saat mereka membutuhkan likuiditas atau menghadapi masalah cash flow. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 dimana porsi kredit terbesar (57,04%) adalah golongan D dengan uang pinjaman Rp510 ribu s.d Rp20 juta atau lebih dan untuk golongan ini pada Tabel 4.3 menunjukkan pertumbuhan rata-rata tertinggi untuk 5 tahun terakhir yaitu sebesar 51,42%. Dari paparan di atas, dapat dimengerti apabila kenaikan maupun penurunan pendapatan per capita sebagian besar masyarakat kita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kredit Pegadaian tetapi kredit Pegadaian lebih dipengaruhi oleh kemudahan,

kecepatan, keamanan dan kenyamanannya dalam memperoleh uang kas, sehingga digunakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah.

### **3. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kredit Pegadaian**

Analisis :

1. Hasil komputasi data pada Tabel 4.4 *Coefficients*, tampak  $t$  hitung untuk TP adalah sebesar 2,335 dan tingkat signifikansi sebesar 0,023.
2. Nilai kritis ( $t$  tabel) untuk 60 pengamatan dan 5 parameter dengan *significance level* 5%, pada tabel distribusi  $t$  terletak pada :  $t_{(n-k); (\alpha/2)}$  atau diantara 2,000 dan 2,009.

Hasil Analisis :

1. Dari komputasi data tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah kecil (0,023 ) dibawah 5%
2.  $t$  hitung sebesar 2,335 secara absolut adalah lebih besar dari  $t$  tabel yang besarnya antara 2,000 –2,009.

Dari hasil analisis di atas, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima atau dengan kata lain hasil penelitian setuju dengan hipotesis bahwa Tingkat Pengangguran (TP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kredit Pegadaian. Dari koefisien regresinya dapat diartikan bahwa jumlah orang yang menganggur meningkat maka Kredit Pegadaian meningkat, dan apabila jumlah orang yang menganggur menurun maka Kredit Pegadaian juga menurun.

Hal ini dapat terjadi karena kredit Pegadaian digunakan untuk keperluan konsumsi, biaya mencari pekerjaan maupun untuk membuka usaha/modal kerja karena orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap (menganggur) sulit untuk memperoleh kredit bank karena dianggap beresiko. Oleh karena itu Kredit Pegadaian adalah alternatifnya. Dalam hal ini Pegadaian memenuhi fungsinya untuk berteduh/berlindung dari lintah darat atau pinjaman tidak wajar lainnya, sebagaimana dimaksudkan oleh filosofi pohon rindang berwarna hijau pada logo Pegadaian (Manual Logo PERUM Pegadaian, 1994, p.2).

#### **4. Pengaruh Kredit Usaha Kecil terhadap Kredit Pegadaian**

Analisis :

1. Hasil komputasi data pada Tabel 4.4 *Coefficients*, tampak  $t$  hitung untuk KUK sebesar 4,825 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
2. Nilai kritis ( $t$  tabel) untuk 60 pengamatan dan 5 parameter dengan *significance level* 5%, pada tabel distribusi  $t$  terletak pada :  $t_{(n-k); (\alpha/2)}$  atau diantara 2,000 dan 2,009.

Hasil Analisis :

1. Dari komputasi data dihasilkan tingkat signifikansi yang sangat kecil yaitu 0,000 yang jauh dibawah 5%
2.  $t$  hitung sebesar 4,825 secara absolut jauh lebih besar dari  $t$  tabel yang besarnya antara 2,000 – 2,009.

Dari hasil analisis di atas, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima atau dengan kata lain hasil penelitian setuju dengan hipotesis bahwa KUK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kredit Pegadaian. Dari koefisien regresi dapat diartikan apabila KUK meningkat maka Kredit Pegadaian juga meningkat dan sebaliknya, jika KUK menurun maka Kredit Pegadaian juga menurun.

Hal ini dapat terjadi disebabkan dengan ekspansinya KUK berarti sektor riil khususnya sektor UKM (usaha kecil menengah) hidup. Hal ini membawa efek *multiplier* pada kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan hidupnya ekonomi masyarakat maka Kredit Pegadaian (walaupun secara generik sama dengan KUK, tetapi mempunyai karakteristik yang berbeda dari segi kecepatan, dan kemudahannya untuk memperoleh uang kas), menjadi kredit alternatif atau pelengkap pada saat masyarakat tersebut membutuhkan likuiditas segera.

#### 4.3.2. Uji Signifikansi Simultan

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab III pengujian ini akan dilakukan dengan Uji Signifikasnsi Simultan, yaitu untuk menguji apakah variabel bebas dalam model secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini akan dilakukan dengan cara :

- a. *Quick look* : yaitu apabila nilai F lebih besar dari 4 (dengan  $\alpha = 5\%$ ) maka  $H_0$  (yang menyatakan tidak ada pengaruh) ditolak, dan  $H_a$  (yang menyatakan ada pengaruh) diterima.



- b. Membandingkan F hitung dengan F tabel, yaitu apabila F hitung lebih besar dari F tabel (F kritis), maka  $H_0$  : ditolak dan  $H_a$  : diterima.

Analisis :

- a. Dari Tabel 4.6 *ANOVA* di halaman berikut tampak nilai F hasil komputasi yang telah diset dengan significance level 5%, adalah sebesar 23,109 jauh lebih besar dari 4. Sesuai dengan kaidah *quick look*, maka  $H_0$  (yang menyatakan tidak ada pengaruh secara simultan) : ditolak dan menerima  $H_a$  yang menyatakan ada pengaruh secara simultan.

Tabel : 4.6  
*ANOVA*

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,4E+09	4	1,6E+09	23,109	,000 <sup>a</sup>
	Residual	3,8E+09	55	6,9E+07		
	Total	1,0E+10	59			

a. Predictors: (Constant), KUK, TP, PPC, PDRB

b. Dependent Variable: KP

- b. F hitung pada Tabel 4.6 di atas adalah sebesar 23,109 sedangkan F tabel untuk  $F_{(k-1; n-k)} = F_{(4; 55)}$  adalah sebesar 2,53. Jadi F hitung jauh lebih besar dari F tabel dan tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti  $H_0$  (yang menyatakan tidak ada pengaruh secara simultan) ditolak dan  $H_a$  (yang menyatakan ada pengaruh secara simultan) diterima.

Maka dari hasil analisis pada butir a dan b di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian setuju dengan hipotesis ( $H_{a5}$ ) yang

menyatakan Pendapatan Domestik Bruto, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan Kredit Usaha Kecil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Kredit Pegadaian.

Namun perlu diakui bahwa kemampuan PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan KUK dalam menjelaskan perubahan Kredit Pegadaian hanya 60 % sedangkan sisanya yang 40 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan KUK. Variabel lain yang dapat mempengaruhi perubahan Kredit Pegadaian a.l promosi, pelayanan, kecepatan dan kemudahan, perbaikan sarana dan prasarana dan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada nasabah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

#### **5.1. Simpulan**

Dari pengujian asumsi klasik menunjukkan tidak ada indikasi multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas pada model regresi yang dihasilkan, sehingga memenuhi syarat sebagai estimator tidak bias linier terbaik. Sedangkan dari hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh terhadap Kredit Pegadaian namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan bagian terbesar balas jasa dalam PDRB diterima oleh kelompok yang mempunyai rekening bank, kartu debit maupun kartu kredit (yaitu pemilik modal, pemilik alat-alat, pengusaha dan sebagian pekerja), sehingga pada saat membutuhkan likuiditas / uang kas, mereka dapat segera menggunakannya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Caskey (1991) di negara bagian Oregon dimana kredit penggadaian dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum.
2. Pendapatan per Capita mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap Kredit Pegadaian. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan manajemen Pegadaian dalam 10 tahun terakhir menggeser paradigma Pegadaian (melalui promosi, peningkatan pelayanan dan perbaikan sarana dan prasarana), bahwa Pegadaian bukan untuk golongan berpenghasilan rendah saja (yang merupakan bagian terbesar masyarakat kita) tetapi juga untuk golongan berpenghasilan menengah

bahkan siapa saja yang membutuhkan dana kas segera, kesulitan likuiditas dan menghadapi masalah *cash flow*, Pegadaian adalah solusinya. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran pinjaman kecil (golongan A, B dan C dengan uang pinjaman Rp10 ribu s.d Rp500 ribu) ke pinjaman golongan D (dengan uang pinjaman Rp 510 ribu s.d Rp20 juta atau lebih). Data 5 tahun terakhir untuk golongan D persinya 57,04% dan pertumbuhan rata-rata 51,42%. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Caskey (1991) di negara bagian Oregon dimana kredit penggadaian dipengaruhi oleh *per capita income* namun secara statistik koefisien estimasinya tidak signifikan.

Hasil penelitian ini juga menepis pendapat atau persepsi masyarakat bahwa pada saat ini Pegadaian sudah bukan lagi ukuran kemiskinan, tetapi lebih kepada lembaga yang memberikan solusi masalah kebutuhan kas dengan cepat dan mudah bagi siapa saja.

3. Tingkat Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap Kredit Pegadaian. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Caskey (1991) di negara bagian Indiana dimana kredit penggadaian dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengangguran .

Hal ini dimungkinkan, karena kredit Pegadaian digunakan untuk keperluan konsumsi, biaya mencari pekerjaan ataupun modal membuka usaha bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau kena PHK. Bagi orang yang tidak mempunyai

penghasilan tetap sulit untuk memperoleh kredit perbankan karena dianggap beresiko, oleh karena itu Kredit Pegadaian menjadi alternatifnya.

4. Kredit Usaha Kecil (KUK) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kredit Pegadaian. Hal ini dapat terjadi disebabkan KUK maupun efek multipliernya membuat ekonomi masyarakat khususnya sektor usaha kecil menengah (UKM) menjadi hidup. Dengan hidupnya sektor UKM maka kredit Pegadaian menjadi alternatif atau pelengkap bagi masyarakat pada saat kesulitan atau membutuhkan uang kas segera.

Hasil penelitian ini paling tidak konsisten dengan hasil penelitian Sapphry (1997) bahwa ada hubungan positif yang kuat antara kredit Pegadaian dengan kredit bank, walaupun secara konsep analisis regresi dan korelasi berbeda, namun berhubungan secara dekat (Gujarati, 1995 : 21).

5. PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan KUK secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kredit Pegadaian. Hal ini berarti apabila PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan Kredit Usaha Kecil secara bersama-sama berubah, maka Kredit Pegadaian akan berubah. Namun perlu diakui bahwa kemampuan PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan KUK dalam mempengaruhi perubahan Kredit Pegadaian hanya 60 % sedangkan sisanya yang 40 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar PDRB, Pendapatan per Capita, Tingkat Pengangguran dan KUK.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi perubahan Kredit Pegadaian antara lain adalah :

- a. kemudahan dan kecepatannya proses kredit hingga diterimanya uang kas.
- b. pelayanan, dalam perusahaan jasa pelayanan merupakan bagian dari produk.
- c. kenyamanan dan keamanan dari fasilitas yang disediakan perusahaan
- d. tingkat suku bunga dan sistem pembebanannya kepada nasabah.

## **5. 2. Implikasi Kebijakan**

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini yang dapat disarankan kepada Manajemen PERUM Pegadaian antara lain :

1. lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga penyedia instant cash yang terkemuka dan terpercaya, sehingga akan lebih menarik nasabah dari golongan menengah dan atas. Hal ini dapat dilakukan disamping dengan kebijakan promosi yang ditujukan kepada pasar sasaran, juga dengan peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan keahlian penaksir/analisis kredit dan penganekaragaman barang jaminan yang dapat diterima terutama yang nilainya tinggi,
2. meningkatkan perannya sebagai pelindung masyarakat dari praktek-praktek lintah darat dan pinjaman tidak wajar lainnya dengan tetap melayani masyarakat berpenghasilan rendah termasuk mereka yang untuk sementara menganggur atau terkena PHK dengan skim kredit yang disesuaikan dengan pasar sasaran, misal dalam hal tingkat bunga dan barang jaminan yang dapat diterima.

3. dalam pembukaan Cabang baru tidak perlu takut bersaing dengan perbankan yang menyalurkan KUK ataupun jenis kredit kecil lainnya, justru sebaiknya dalam pembukaan Cabang baru berdekatan dengan daerah dimana sektor usaha kecil dan menengah hidup. Karena kredit Pegadaian walaupun secara generik sama dengan kredit KUK maupun kredit skala kecil lainnya, namun kredit Pegadaian mempunyai karakteristik khusus sehingga dapat menjadi pelengkap atau alternatif bagi masyarakat sektor industri kecil dan menengah pada saat membutuhkan uang kas segera.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan antara lain mengenai variabel dan data yang digunakan. Variabel ekonomi makro yang digunakan hanya PDRB, pendapatan per capita dan tingkat pengangguran yang diambil dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Untuk variabel ekonomi makro sebaiknya ditambah proksi yang digunakan dengan tingkat inflasi, kurs rupiah atau harga emas dan tingkat bunga. Untuk penelitian dengan data time series sebaiknya menggunakan data yang rentang waktunya lebih panjang.

### **5.4. Agenda Penelitian Mendatang**

Agenda penelitian mendatang sebaiknya meneliti variabel lain yang masih diduga mempengaruhi Kredit Pegadaian seperti kualitas pelayanan, proses kredit, kualitas penaksir/pemutus kredit dan tingkat dan sistem bunga yang diterapkan.

## DAFTAR REFERENSI

- Algifari, 1997, **Analisis Statistik Untuk Bisnis**, BPFE, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, **Analisis Regresi : Teori, Kasus dan Solusi**, BPFE, Yogyakarta.
- Andrews, David, 1989, "Pawn Advance", **Credit Management**, Date : Feb, p : 34-35.
- Anonymous, 1993, "Popping the weasel in China", **Economist**, Vol : 326, Iss : 7796 p : 32
- Bank Indonesia, 2002, **"Statistik Ekonomi Keuangan Daerah"**, Bank Indonesia Semarang, Vol : 2, No : 3.
- Baum, Julian, 1991, "Bankers Abound :Taiwan Awards Lending Licence to 15 Groups", **Far Eastern Economic Review**, Vol : 153, Iss : 28, p : 35-36.
- Biesada, Alexandra, 1993, "The Pawnshop", **Financial World** , Vol : 162, Iss : 3, p : 76-80
- Biro Pusat Statistik, 1997, 1998, 1999, 2000, **"Jawa Tengah Dalam Angka"**, Kerjasama Bappeda Daerah Tk. I dan Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
- Bobby Bayu Yohandri Baskoro (1999), "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Perbankan dan Indeks Harga Konsumen Terhadap Permintaan Pinjaman Gadai Pada PERUM Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang", **Skripsi pada STIKUBANK Semarang**, Tidak dipublikasikan.
- Brown, Christie, 1991, "Pawnbrokers to the Stars", **Forbes**, Vol : 148, Iss : 1, p : 104-105
- Caskey, John P. 1993, "Pawnbroking in America : The Economics of a Forgotten Credit Market", **Journal of Money, Credit and Banking**, Vol : 23, Iss : 1, p : 85-89.
- Caskey, John P; Zikmund, Brian J. 1990, "Pawnshops : The Consumer's Lender of Last Resort", **Economic Review (Federal Reserve Bank of Kansas City)**, Vol : 75, Iss : 2, p : 5-18.



- Ghozali, Imam, 2001, **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 1995, **Basic Econometrics**, Third Edition, McGraw Hill, Inc. Singapore.
- Hartati Nurwidjaya, 2000, "Pajak Gadai (Pawnshop) di Kuala Lumpur dan Singapura", **Warta Pegadaian**, Vol : 12 Iss : 93, p : 44-45.
- Kwik Kian Gie, 1999, **Ekonomi Indonesia Dalam Krisis dan Transisi Politik**, PT.Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.
- Sapphry Laksana , 1997, "Informal Finance : A Study of the Indonesian Pawnshop (1952-1996)", **Research Practical Report untuk Master of Banking pada Monash University**, Tidak dipublikasikan.
- Sethyon, Ketut, 2002, **Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu**, PERUM Pegadaian Kantor Pusat, Jakarta.
- Syedain, Hashi, 1991, "The Redemtion of Pawnbroker", **Management Today (MTO)**, Jan 1991, p : 44-46.
- Syubli Abas, 1992, "Akibat-akibat Hukum Peralihan Fungsi Lembaga Jawatan Pegadaian kepada Perusahaan Umum, **Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta**, Tidak dipublikasikan.
- Soeparmoko, 1990, **Pengantar Ekonomika Makro**, BPFE Yogyakarta.
- Soeksmono, Besar Martokoesoemo, 1995, **Diluar Batas Sektor Perbankan dan Keuangan Formal Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Steiner, Mindy; Strischek, Dev. 1992, "Lending to Pawnshops", **Journal of Commercial Lending**, Vol : 74, Iss : 8, p : 42-51.
- Welles, Edward O. 1990, "Tin Men", **Inc (INO)**, Vol : 12, Iss : 10, p : 66-75.
- , 1998, "Valuation of the Pawnshop Industry", **The Weekly Corporate Growth Report**, Iss : October 12, p : 9821-9822.
- , 1992, **Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 826/KMK.013/1992** tanggal 24 Juli 1992 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989, Jakarta.

- , 2000, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia** Nomor : 103 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. , Jakarta.
- , 2001, **Matrix Perubahan Ketentuan KUK (PBI NO. 3/2/PBI/2001)**, Biro Kredit Bank Indonesia.
- , 1997, **Kebijakan dan Upaya Perbankan Dalam Membantu Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi**, Bank Indonesia, April.
- , 1994, **Keputusan Direksi PERUM Pegadaian**, Nomor : OPP.3/5/35 tanggal 28 April 1994, tentang Pengukuhan Logo dan Penetapan Buku Manual Logo PERUM Pegadaian, p : 2.
- , **Company Profile**, Kantor Pusat PERUM Pegadaian, Jakarta, p : 28.